

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Covid-19 ditemukan pertama kalinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini kemudian dengan cepat menyebar ke beberapa kota lainnya dan sudah merenggut ribuan korban jiwa di Negara asalnya. (Analisis Data, 2020) Seperti yang dijelaskan oleh WHO, Covid-19 memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, yang dapat berlanjut pada sakit parah dan radang paru (Pneumonia), sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. (WHO, n.d.). Sejak mewabah Desember tahun lalu, tercatat ada sebanyak 80 ribu lebih kasus yang ditemukan di Tiongkok dengan rincian sebanyak 3 ribu lebih meninggal dan 70 ribu lebih berhasil disembuhkan. (Liputan6.com, 2020). Virus ini menyebar dengan cepat dan menginfeksi 54 Negara. Bahkan untuk pertama kalinya terjadi kasus yang lebih besar dari jumlah kasus yang terdapat di Tiongkok (Craven, 2020).

Perkembangan perekonomian dewasa ini khususnya dalam memasuki akhir dari kuartal I di tahun 2020 menjadi fenomena horor bagi seluruh umat manusia di dunia. Mengapa tidak, organisasi berskala internasional bidang keuangan yaitu “*International Monetary Fund dan World Bank*” memprediksi bahwa hingga di akhir kuartal I di tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam (Craven, 2020). Pertumbuhan ekonomi global dapat merosot ke negatif 2,8% atau dengan kata lain terseret hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi

global di periode sebelumnya. Padahal, kedua lembaga tersebut sebelumnya telah memproyeksi ekonomi global di akhir kuartal I tahun 2020 akan tumbuh pada persentase pertumbuhan sebesar 3% (Maryanti, Netrawati, & Wayan, 2020). COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan berubah menjadi pandemi yang horor bagi masyarakat dunia.

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya *supply chain* (Pepinsky & Wihardja, 2011). Pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan dampak yang horor, namun juga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Diantaranya yaitu pasar ekspor baru selain China dapat memiliki peluang yang besar untuk masuk ke Indonesia.

Kabupaten Sanggau adalah sebuah area di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Diantara 17 struktur ekonominya, ada beberapa sektor utama penopang perekonomian Sanggau yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor. Apabila dilihat dari struktur perekonomiannya, Kabupaten Sanggau ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi terbesar di Kabupaten Sanggau dari periode 2012 hingga 2016, kontribusi sektor ini selalu di atas 35% terhadap perekonomian Kabupaten

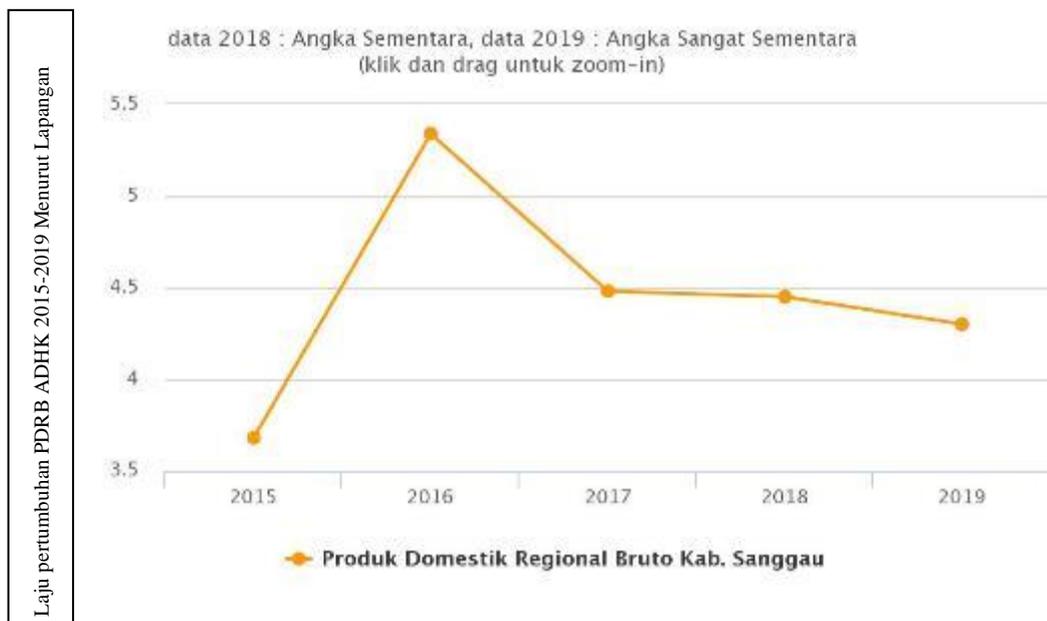
Sanggau. Kemudian, Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor penopang perekonomian kedua di Kabupaten Sanggau.

Selama lima tahun terakhir (2016- 2020) struktur perekonomian Kabupaten Sanggau didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2. Industri Pengolahan dan 3. Pertambangan dan Penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sanggau pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 32,10% (angka ini meningkat dari 30,60% di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17,33 (turun dari 19,58% di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian 10,96% (meningkat dari 8,27% di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,35% (menurun dari 12,08% di tahun 2016) dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,64%.

Pada grafik 1.1 dibawah ini dapat kita lihat bahwa selalu terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2017 hingga 2019. Covid-19 yang terus menerus menyebar luas semakin memperpanjang kecemasan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat banyak yang tidak lagi bekerja atau berdagang. Masyarakat yang bekerja secara informal dengan pendapatan harian dan pendapatan tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif rendah. Penurunan

pendapatan akan membuat konsumsi di masyarakat yang bekerja di sektor informal juga menurun.

Grafik 1. 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun Dasar 2015-2019 Kabupaten Sanggau (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2020

Sejak mewabahnya virus ini sebagian masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Misalnya untuk beberapa pabrik yang masih bisa bertahan mereka melakukan pengurangan jumlah karyawan. Selain itu, sejak dilakukan *Social Distancing* membuat ekonomi semakin menjadi mati. Akibatnya, masyarakat banyak kehilangan pekerjaan, yang disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal bekerja dipabrik juga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat. Selain itu, banyak pedagang mengeluhkan penurunan omset dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena di Kabupaten Sanggau

harga bahan-bahan pasar lebih mahal dibandingkan dengan Kota Pontianak. Hal ini disebabkan bahan-bahan pokok masyarakat di Kabupaten Sanggau berasal dari Kota Pontianak yang berjarak sekitar 195 km dari Kabupaten Sanggau sehingga menyebabkan kenaikan harga dibandingkan dengan Kota Pontianak.

Peneliti memilih Kabupaten Sanggau sebagai lokasi penelitian dikarenakan ingin mengetahui peran pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengarahkan masyarakat sekitar melalui kebijakan serta membentuk program untuk membantu pemulihan perekonomian dengan mengembangkan UMKM dimasa Pandemi COVID-19 ini. Selain itu, Sanggau terletak di perbatasan antara Indonesia dengan Sarawak (Malaysia) dan mempunyai akses perdagangan dengan perbatasan resmi Entikong. Dan Kabupaten ini merupakan daerah pengembangan kawasan perbatasan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Perencanaan pengembangan kawasan perbatasan tersebut fokus pada tiga hal yaitu: (1) Pengembangan kapasitas kawasan perbatasan; (2) Pembangunan perekonomian perbatasan; dan (3) Pembangunan sosial budaya perbatasan. Akibatnya struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat terkait dengan program pengembangan kawasan perbatasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kebijakan pemerintah daerah untuk memulihkan keadaan perekonomian masyarakat di yang tertuang dalam penelitian berjudul: “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Pengembangan UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Pengembangan UMKM Untuk Pemulihan Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19?
2. Apa Saja Dampak Yang Dirasakan Oleh Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Sanggau Akibat Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau Dalam Pengembangan UMKM Untuk Pemulihan Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19.
2. Untuk Mengetahui Dampak Yang Dirasakan Oleh Para Pelaku UMKM Di Kabupaten Sanggau Di Masa Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat tidak hanya kepada penulis akan tetapi kepada masyarakat umum. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memulihkan perekonomian masyarakat. Selain itu, manfaat dari adanya

penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan kedepan bagi pembaca tentang partisipasi yang telah di laksanakan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menangani penurunan tingkat perekonomian pada kondisi darurat seperti Pandemi COVID-19 ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah adanya pandangan bagi Pemerintah Kabupaten lain untuk melakukan kegiatan yang serupa guna pemulihan perekonomian masyarakat di wilayahnya juga memberikan bukti yang konkret mengenai keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mengadakan program pemulihan ekonomi.

1.5 Kajian Pustaka

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Tulisan	Hasil Tulisan
1	Wibowo Hadiwardoyo, 2020	Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19	Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Kerugian itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal.
2	Sri Maryanti, I Gusti Ayu Oka Netrawati & I Wayan Nuada, 2020	Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB	Mencegah meluasnya penyebaran virus ini, Pemprov NTB melakukan beberapa langkah sesuai dengan arahan pemerintah pusat, mengeluarkan

			kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat untuk belajar, bekerja dan beribadah dari rumah (Work From Home) dalam upaya memutus mata rantai penyebaran. Disisi lain, keadaan ini akan mendorong turunnya permintaan secara drastis, kegiatan produksi pun ikut terhambat. Saat ini Covid-19 bukan hanya menjadi ancaman bagi kesehatan manusia, tetapi juga sudah mulai mempengaruhi fundamental perekonomian NTB.
3	(Putri, 2020)	Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2)	Selain kebijakan, keikutsertaan masyarakat dan kesadaran yang mereka miliki ternyata juga mempengaruhi pengendalian dan pencegahan penularan wabah COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu di butuhkan langkah yang tepat dari pemerintah untuk membentuk kesadaran masyarakat.
4	(Mulanahardi & Agusti, 2019)	Peran Pemerintah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dan Alternatif Kebijakan Pajak Untuk UMKM Di Bidang Pariwisata Pasca Bencana. Jurnal	Partisipasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat di laksanakan melalui pengadaaan retribusi pajak terhadap umkm pariwisata. Dalam hal ini pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

		Media Bina Ilmiah, Vol.14, No.3.	pengawas di lapangan, sosialisasi redistribusi, pendataan pajak, dan koordinasi antar pihak guna mendukung pelaksanaan pemungutan pajak.
5	(Kurniawan, 2020)	Peran Dan Fungsi Pemerintahan Good Governance Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Vol. 3, No.2	Pada penelitian ini, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah perlu melangsungkan partisipasinya dalam menerapkan pengelolaan administrasi sehingga mampu menimbulkan dampak yang baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan yang di butuhkan suatu daerah.
6	(Suliswati & Razi , 2020)	Kebijakan Pemerintah Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.7, No.2.	Penelitian ini menjelaskan jika rekonstruksi ekonomi dapat di laksanakan melalui pengembalian kegiatan masyarakat secara normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini disebabkan apabila masyarakat tidak melakukan kegiatan seperti biasa dalam pemenuhan kebutuhan hidup maka tidak menutup kemungkinan jika perekonomian mereka akan meredup. Maka dari itu, kegiatan seperti biasa perlu di laksanakan dengan protokol kesehatan agar tetap terhindar dari penyebaran virus COVID-19 apabila melaksanakan

			kegiatan di luar rumah atau tempat umum.
7	(Maryanti , Netrawati , & Faezal , 2019)	Menggerakkan Perekonomian Melalui Pemulihan Usaha Dan Industri Mikro Kecil Menengah Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat. Open Journal System, Vol.14,No.4.	Pasca bencana alam memang tidak dapat di pungkiri jika perekonomian meredup, terutama bidang pariwisata.Maka sebab itu, meredupnya perekonomian pun perlu di bangkitkan secara bertahap dengan adanya industry mikro kecilmenengah yang dpaat di laksanakan oleh masyarakat guna membantu keadaan perekonomian sehari-hari. Meskipun tidak langsung mengalami pelonjakkan, akan tetapi hal tersebut dapat membantu pemulihan secara perlahan.
8	(Muhyidin, 2020)	Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia. The Indonesian Journal Of Development Planning. Vol. 4, No.2	Adanya COVID-19 cukup meimbulkan kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menjelaskan terdapat 3 alter natif yang dapat di lakukan oleh pemerintah guna melaksanakan pembangunan negara di era New Normal, yakni : perencanaan semula, revisi moderat pada pembangunan, dan pergantian rencana untuk ke tahap pemulihan perekonomian yang perlu di perbarui sebab kondisi

			negara yang sangat jatuh pada tahun ini.
9	(Yunus & Rezki , 2020).	Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i. Vol. 3, No.2	Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah perlu mengambil langkah sebagai salah satu upaya penekanan wabah COVID-19. Adapun kebijakan yang di ambil pemerintah dalam menekan peningkatan penyebaran wabah COVID-19, maka terdapat kebijakan berupa Lockdown guna mengantisipasi masyarakat untuk bertemu secara kerumunan di masa pandemi ini. Dari sini dapat di lihat bahwasannya kebijakan di ambil berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat sebab di dalam kebijakan juga terdapat langkah yang harus di ambil pemerintah dalam meredakan isu publik.
10	(Junianingsih , Consuello , & Tarmidzi , 2020)	Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I, Vol. 7, No.6.	Pelaksanaan kebijakan publik memerlukan koordinasi antar stakeholder yang membentuk, memutuskan, hingga melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan juga memerlukan beberapa pendekatan agar berjalan optimal dan terselesaikan sesuai tujuan dan sasaran.

Sumber : Data Peneliti Tahun 2021

1.6 Kajian Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

1.6.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil sebagai alternatif pemerintah terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan tersebut (Kambey, 2017). Kebijakan dapat di substansikan sebagai keputusan dari beberapa pilihan guna mewujudkan pencapaian tujuan yang dilatar belakangi oleh isu publik sehingga memerlukan keputusan agar mendapatkan penghasilan solusi (Tachjan, 2008). Menurut Iskandar (2012), pembentuk kebijakan publik terdapat rangkaian berupa rencana program, pelaksanaan program melalui aksi serta aktivitas yang di timbulkan, keputusan, serta sikap pembentuk saat menyelenggarakan kebijakan.

Terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan, seperti halnya penetapan pada tindakan penyelenggara kebijakan publik, bentuk nyata atau hasil yang di cetak dari kebijakan publik tersebut, kebijakan publik selalu di landasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan adanya kepentingan yang menyeluruh dari keberadaan kebijakan publik. Konteks kebijakan yang di laksanakan pemerintah ini menjelaskan adanya hakekat berupa aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menciptakan keberlangsungan hidup masyarakat sesuai dengan cita-cita bersama (Islamy, 1994). Hal ini di setuju pula oleh Winarno (2002) jika klasifikasi kebijakan publik terbagi dalam dua kategori, yaitu sebagai tindakan pemerintah di

sebuah kebijakan dan proses penyelesaian masalah dengan melakukan perumusan, pelaksanaan, dan penilaian.

Kebijakan publik yang di bentuk dan di laksanakan pemerintah juga memiliki peran lain bagi pemerintah , yakni menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk mengambil atau bahkan tidak megambil keputusan pada suatu kondisi. Tindakan itu pula yang mencerminkan sifat dan sikap pemerintah di mata masyarakat mengenai langkah keputusan yang di peroleh, apalagi yang bersangkutan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu kebijakan publik memiliki beberapa sifat, antara lain regulative, ekstraktif, organisasional, dan distributif (Dye, 2005).

Agustino (2008) menjelaskan perihal karakteristik utama dari kebijakan publik yang mengandung unsur kegiatan dari segala keputusan yang terpisah mengenai kesungguhan pemerintah dalam melakukan sesuatu baik bersifat positif atau pun negatif. Positif dan negatifnya kebijakan publik dapat di lihat dari perbandingan antara pengambilan keputusan dengan tindakan, dikatakan positif apabila pemerintah mampu memutuskan kebijakan beserta tindakan yang relevan. Kebijakan publik juga mampu mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi. Adapun peran kebijakan publik pada aspek sosial dan ekonomi ialah sebagai berikut :

a. Kebijakan Publik untuk Aspek Sosial

Pada hakekatnya kebijakan publik dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Pasalnya kebijakan berfungsi sebagai pengatur sekaligus wadah untuk

menyalurkan segala interaksi terkait kesatuan sosial yang di dasarkan terhadap perbedaan suku, bangsa, adat, agama, dan kedaerahan lainnya. Kebijakan publik dapat pula di maknai sebagai suatu proses yang berinteraksi negara beserta rakyatnya (Parsons, 1997).

Kebijakan publik merupakan lingkup bersama yang menggambarkan lingkup publik ialah lingkup bersama terkait masalah dan kebutuhan sosial. Dalam suatu kebijakan publik juga terdapat strategi dan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui perlindungan dan jaminan yang mencakup bantuan, jaminan, bahkan pengamanan sosial (Suryono, 2014).

b. Kebijakan Publik untuk Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, kebijakan ialah suatu paket yang dapat berinteraksi dengan segala tatanan pasar ekonomi sehingga mampu bersistem secara dinamis apabila di kelola dengan benar. Kebijakan publik memiliki peran utama agar dapat berkembang dengan ekonomi pasar melalui ekosistem pasar dengan cara memberi insentif atau regulasi yang ketat.

Kebijakan publik terdapat sebagian intensitas bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan apabila aspek ekonomi juga terdapat gap dan realitas yang jauh dari ekspektasi yang di harapkan seperti halnya *unintended consequence*. Jika tidak cermat dan tidak menyadari dari awal maka dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat (Negara, 2017).

Namun, dikatakan sebagai sisi negatif jika keputusan tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya, yakni (Solichin, 2008) :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusannya
2. Tidak semua kebijakan dibedakan dari administrasinya
3. Kebijakan mencakup harapan dan perilaku
4. Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai
5. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang tertera secara eksplisit maupun implisit
6. Kebijakan diruluskan secara subjektif

1.6.1.2 Indikator Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell, terdapat beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator dari kebijakan, adapun indikator tersebut ialah (Syafiie, 1992) :

1. Keputusan yang jelas
2. Kecenderungan atas isu atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga memerlukan kebijakan publik.
3. Kondisi dari lingkungan masyarakat saat isu publik tersebut muncul
4. Proyeksi keadaan kedepannya setelah adanya kebijakan publik tersebut muncul.
5. Hasil yang di berikan dari berlangsungnya kebijakan publik tersebut

Menurut Howlet & Ramesh (1995), tahapan pada pembentukan kebijakan oleh pemerintah juga dapat dijadikan standar kesesuaian yang terdiri dari :

1. Penyusunan agenda

Pada poin ini, pemerintah diminta agar mampu memusatkan perhatian masyarakat terhadap suatu kebijakan atas keberadaan isu publik sehingga

membantu langkah awal pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik kedepannya.

2. Formulasi terhadap kebijakan

Pada tahap ini, tidak semua hal mengenai isu publik dijadikan sebagai kebijakan pemerintah. Peralunya, pemerintah perlu memilah hal-hal apa saja yang pantas untuk di rumuskan kedalam kebijakan publik.

3. Pembentukan kebijakan

Pembentukan kebijakan juga merupakan proses pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembentuk dan penyelenggara kebijakan. Pada tahap ini standar pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan sangatlah di perhatikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan penafsiran kesesuaian atau tidak terhadap kondisi masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk sesuai dengan standar dan kebutuhan agar mencapai hasil yang kemudian di kelola pada evaluasi kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahapan akhir ini hasil dari pengimplementasian kebijakan akan di evaluasi dan dilakukan penilaian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pengadaan dari kebijakan publik.

Kebijakan publik ternyata juga mampu menimbulkan suatu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pada suatu program agar terlaksana secara efektif dan efisien ((Sjafrizal, 2009) dalam Indahsari, 2016)).

Menurut Chandler (1962), strategi pemerintah dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibentuk berdasarkan prioritas pada alokasi dana beserta sumber daya sehingga mempermudah pelaksanaan program. Keberadaan strategi dalam pelaksanaan program pemerintahan diciptakan untuk pencapaian persaingan melalui tindakan khusus agar terjadi peningkatan pada penyelenggara program dan penerima program (Hamel & Prahalad, 1995). Hal ini dikarenakan seluruh arah serta orientasi dari organisasi mempengaruhi mekanisme yang di rencanakan pihak pengelola program berdasarkan perspektif kondisi di masa yang akan datang. Pengimplementasian strategi ialah tahap penting yang sudah seharusnya di rumuskan secara jelas dan tepat agar tidak menyebabkan kesalahan organisasi saat merealisasikan kebijakan publik.

1.6.2 Pemulihan Ekonomi

1.6.2.1 Pengertian Pemulihan Perekonomian

Pemulihan perekonomian merupakan upaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dari ketimpangan publik. Proses pemulihan ini mengandung reformasi program yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi bangsa. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi ialah melalui pembenahan pada lapangan kerja, upah pegawai dan buruh, serta membentuk kebijakan yang kuat mengenai kegiatan ekonomi agar masyarakat menengah kebawah mendapatkan hak finansial.

Menurut Sumodiningrat (1999), pemulihan ekonomi rakyat dapat di laksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang mencakup pemberian

peluang, penguatan pada transaksi, penguatan industry, pemerataan pada spasial, dan terdapat kemunculan wirausaha baru. Pada konsep pemulihan ekonomi, masyarakat sudah seharusnya dilaksanakan secara elegan dan alami tanpa adanya diskriminasi ekonomi. Adapun hal-hal penting dalam penguatan ekonomi di masa pemulihan ialah kelembagaan yang kuat, SDM yang solid, sarana dan prasarana yang memadai serta penguatan posisi penjualan di bidang wirausaha. Pemulihan ekonomi juga perlu dikaji pelaksanaannya melalui strategi pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang.

Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru.

2. Mencapai stabilitas ekonomi .

Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat.

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Beberapa strategi untuk mengembangkan perekonomian melalui dunia usaha, yakni(Siwu, 2019):

1. Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan kualitas lingkungan.
2. Pembuatan pusat informasi terpadu yang dapat memudahkan masyarakat dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk segala macam kepentingan, terutama mengetahui masalah perijinan, rencana pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah, ketersediaan lahan, ijin mendirikan bangunan, dan sebagainya.
3. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. Selain peranannya yang penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan kewirausahaan, usaha kecil sering kali mengalami kegagalan atau tidak dapat berkembang dengan baik. Faktor penyebab utamanya adalah buruknya manajemen usaha kecil. Oleh karena itu, perlu didirikannya suatu pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil yang siap untuk membantu para pengusaha kecil tersebut sehingga kinerjanya meningkat.
4. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor, dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis.
5. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang). Peningkatan persaingan di dunia yang berbasis ilmu pengetahuan sekarang ini menuntut pelaku bisnis dan pemerintah daerah untuk secara terus menerus melakukan kajian tentang pengembangan produk baru, pengembangan teknologi baru, dan pencarian pasar- pasar baru.

1.6.2.2. Teori Ekonomi Mikro

Teori ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Teori ekonomi mikro (yang sering juga ditulis sebagai mikroekonomi) merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu baik konsumen dan perusahaan serta bagaimana penentuan harga-harga pasar dan kuantitas input, barang maupun jasa yang diperjualbelikan di pasar. Ekonomi mikro ini meneliti bagaimana keputusan dan perilaku tersebut dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, akan menentukan harga dan bagaimana harga, pada gilirannya dapat menentukan penawaran dan permintaan atas barang dan jasa selanjutnya.

Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan dari ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang dapat membentuk harga secara relatif kepada produk dan jasa yang ada, dan mengalokasikan sumber yang terbatas diantara banyak penggunaan alternatif pemenuhan kebutuhan. Ekonomi mikro juga dapat menganalisis kegagalan pasar (*market failure*), yaitu ketika pasar gagal dalam melakukan produksi hasil yang efisien dan disamping itu juga menjelaskan berbagai kondisi yang secara teoritis dibutuhkan bagi suatu pasar persaingan sempurna. Adapun bidang penelitian yang penting dalam ekonomi mikro, yaitu pembahasan mengenai keseimbangan umum (*general equilibrium*), keadaan pasar dalam informasi asimetris dan pilihan dalam situasi ketidakpastian.

Serta berbagai aplikasi ekonomi dari teori permainan. Disamping itu juga yang patut mendapat perhatian ialah mengenai pembahasan mengenai elastisitas produk dalam sistem pasar. Teori ekonomi mikro analisisnya dapat dibuat berdasarkan pemikiran antara lain sebagai berikut:

1) Kebutuhan dan keinginan manusia jumlahnya sangat tidak terbatas; 2) Kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sifatnya terbatas (Hidayati, 2019).

Ekonomi mikro membicarakan tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beranekaragam. Teori ini juga akan mempelajari ekonomi secara khusus maksudnya membahas tentang aktivitas ekonomi dari suatu satuan ekonomi dari keseluruhan seperti konsumen, pemilik faktor-faktor produksi, tenaga kerja, perusahaan, industri dan lain sebagainya (Aisyah & Khadijah, 2017). Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi. Individu dimaksud seperti konsumen, pemilik sumber-sumber daya dan perusahaan dalam perekonomian pasar bebas. Adapun indikator dari ekonomi mikro ialah (Khusaini, 2013):

a) Interaksi

Interaksi di pasar barang Pasar diartikan sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) atau pertemuan antara penjual dan pembeli suatu barang dengan jumlah tertentu

sehingga tercipta suatu harga. Misalnya pasar beras, pasar mobil, pasar elektronik.

b) Perilaku penjual dan pembeli

Baik penjual maupun pembeli sama-sama memiliki sifat yang rasional, yaitu dimana penjual menginginkan adanya keuntungan yang maksimal (maximum profit) sedangkan pembeli menginginkan kepuasan maksimal (maximal utility).

c) Interaksi di pasar faktor produksi

Dari sisi pembeli (konsumen) memiliki faktor produksi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan penjual (produsen) memiliki barang kebutuhan manusia dan membutuhkan faktor-faktor produksi dengan cara membelinya. Dari hubungan tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen dan produsen memiliki hubungan timbal balik atau saling membutuhkan.

1.7 Definisi Konseptual

1. Kebijakan Pemerintah merupakan suatu keputusan yang di ambil pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik sehingga terbentuk solusi dan upaya yang harus di laksanakan dalam menghadapi kondisi yang ada.
2. Pemulihan Ekonomi merupakan upaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dari ketimpangan publik. Proses pemulihan ini mengandung reformasi program yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi bangsa.

1.8 Definisi Operasional

Tabel 1. 2
Definsi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemulihan Ekonomi	Keputusan yang Jelas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan masalah dengan tindakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya b. Pembentukan kebijakan yang diwujudkan pada suatu program dalam pemulihan ekonomi sebagai penanganan dampak COVID-19
	Isu publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan masyarakat. b. Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga membutuhkan kebijakan. c. Interaksi barang di pasar berupa permintaan dan pemasukan
	Kondisi lingkungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Permintaan masyarakat yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan b. Pengeluaran yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan permintaan
Pemulihan Ekonomi (Kebijakan Terhadap UMKM)	Mengembangkan perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil. 2. Meningkatkan daya saing terhadap produk-produk lokal, dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis. 3. Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang).

Sumber : Data Peneliti 2021

1.9 Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penelitian ini adalah di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

1.9.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang di dapatkan peneliti berasal dari kegiatan wawancara dan kunjungan langsung terhadap Pemerintah Kabupaten Sanggau, Instansi Pemerintah, dan Survei terhadap UMKM yang mengalami kemunduran perekonomian dan berusaha dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi dimasa Pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan wawancara dan survey tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan data akurat dan kejelasan mengenai kebijakan pemulihan ekonomi untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal dan prosiding seminar nasional sebagai bantuan acuan data dalam penulisan ini. Selain melalui penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai kebijakan pemulihan ekonomi untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19.

1.9.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra, 2018).

b. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai catatan tertulis yang di terima peneliti dari narasumber terkait suatu hal yang telah terjadi baik fakta dan data terkait kenaikan dan penurunan UMKM selama pandemi dari BPS sebagai bahan dokumentasi yang dapat dilampirkan dalam penelitian. Studi dengan melakukan penyelidikan data,

dokumen penting, jurnal, berita, dan file terangkum dalam rangkaian dokumentasi ini.

1.9.5. Teknik Analisis Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-ata terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat di gunakan dalam analisis data ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang di lanaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum.

Mengenai penelitian yang di dapatkan melalui beberapa sumber, maka penulis akan menganalisis tema tersebut dengan logika yang relevan serta di imbangi fakta yang akurat agar mempermudah dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga melahirkan penelitian yang tidak sama seperti penelitian sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini ialah menggunakan teknik triangulasi data agar mendapatkan data secara akurat guna mempermudah pengkajian permasalahan berupa :

- a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sebelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis mampu menajamkan, menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang dapat diverifikasi. Data kualitatif yang di hasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu : seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

b. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

c. Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.